BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika merupakan permasalahan dan tantangan yang secara tidak langsung harus dihadapi manusia saat ini dan seterusnya. Pada dasarnya manusia sejak lahir telah memiliki nilai-nilai etika yang mulia. Filsafat kuno biasa berkata "Manusia itu dilahirkan sebagai lembaran kertas yang putih, oleh pendidik dibentuk seperti apa yang ia kehendaki" atau "Manusia itu seperti tepung cair, oleh pendidik dicetaknya menurut apa yang ia sukai".[1] Akan tetapi seringkali masih adanya banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Agama Islam telah hadir di tengah-tengah bangsa Arab yang memang pada saat itu sedang merosot etiknya. Kedatangan Islam salah satunya ialah membawa misi utama dalam perbaikan etika bangsa Arab yang telah menyimpang dari peradaban manusia.[2]

Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk politik, untuk menunjukkan pemikirannya terkait politik, serta turut ikut andil dalam *input* maupun *output* dari kegiatan politik dalam suatu pemerintahan. Dalam hal ini manusia haruslah memiliki kriteria atau ukuran tertentu dan tujuan dalam mencapai sebuah tatanan pemerintahan yang baik. Namun, terkadang manusia ketika dihadapi dengan kekuasaan dimanapun dan kapanpun tidak semuanya dilakukan dengan baik dan sering juga disalahgunakan. Oleh karena itu, sejak dulu manusia selalu berupaya

---

[1] Ahmad Amin, *Etika(Ilmu Akhlak)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 14.
[2] Abdul Qadir Jailani, *Negara Ideal: Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari jalan keluar untuk menentang dalam penyalahgunaan kekuasaan terutama orang-orang yang memegang kekuasaan politik.[3]

Menurut Franz Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul Etika Politik, etika tentang bagaimana prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap tindakan manusia di berbagai lingkup kehidupan individu. Etika dapat dikatakan sama halnya dengan akhlak atau moral. Keduanya merupakan pengetahuan tentang sebuah kebiasaan atau adat. Etika politik tergambarkan dari sikap dan perilaku politik suatu bangsa yang mana sesuai dengan kerangka aturan yang dapat membentuk logika berpikir individu ataupun publik demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.[4] Dasawarsa ini negara seringkali dianggap kurang baik mengingat citra politik yang tidak lepas dari aspek negatif. Tidak jarang kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.[5]

Adapun perbedaan tingkatan kriteria atau ukuran tertentu ketika dihadapi dengan betul atau salahnya suatu tindakan politik. Pertama yang paling umum ialah prinsip-prinsip moral dasar seperti prinsip keadilan. Tingkatan kedua lebih mengacu pada bidang permasalahan seperti prinsip bahwa kekuasaan harus dilegitimasikan secara demokratis. Tingkat ketiga ialah menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman, kondisi dan situasi.[6] Sebagian besar

---

[3] Runi Hariantati, "Etika Politik dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No.1 (t.k: 2003), 57.
[4] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), 12.
[5] Anicetus B. Sinaga, *Etos dan Moralitas Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 16.
[6] Suseno, *Etika Politik*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika politik adalah tentang apa yang seharusnya dilakukan pejabat bila ada sesuatu hal yang salah atau orang yang bertindak salah. Etika yang baik akan mungkin tercipta ketika negara telah menegaskan tata aturan yang mengarah pada setiap perilaku warganya yang baik, guna kebaikan bersama.

Dari sinilah kita bisa mengukur apakah perilaku politik yang berkembang di negeri ini mengarah pada kepentingan bersama (rakyat) atau justru hanya membentuk pada kepentingan kelompok atau pribadi saja. Terkadang atas nama kebebasan, kepentingan menjadi terfokus pada satu titik saja tanpa peduli hak asasi orang lain. Standar etika perlu ditegakkan melalui barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praksis.[7]

Jika kita melihat sejarah perkembangan umat manusia bahwa tujuan negara tidak hanya untuk kepentingan umum tetapi juga diarahkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu seperti raja-raja dan sanak saudaranya baik di wilayah-wilayah Barat maupun wilayah-wilayah Timur. Seiring berjalannya waktu tersebarnya beragam pemikiran para ilmuwan atau pakar dan peran media massa menjadi kesadaran bersama oleh masyarakat untuk tidak dapat menerima perlakuan atau paham oligarkis tentang negara. Hal itulah yang kemudian menjadi proses lahirnya demokrasi.[8]

Untuk menuju demokrasi secara empiris tidaklah mudah untuk beberapa negara terutama negara-negara komunis yang pada kenyataannya sangat otoriter. Pada zaman modern saat inipun beberapa penguasa-penguasa juga seringkali

[7] Hariantati, *Etika Politik*, 58.
[8] Sinaga, *Etos dan Moralitas*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki implikasi dalam tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tidak hanya dalam rezim otoriter melainkan juga dalam era reformasi saat ini.

Tidak jarang politik dianggap kotor, bukan hanya rakyatnya yang dipermainkan akan tetapi, juga perjuangan politik untuk kepentingan pribadi maupun pada golongan tertentu dilakukan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai keadilan. Meski dipertegas secara lisan bahwa konsep negara sebagai negara hukum dan berlakunya undang-undang yang tidak pandang bulu.[9]

Kodrat sosial manusia menuntut manusia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika negara dan politik sudah merupakan sebuah kodrat maka tidak ada jalan lain selain menjalankannya. Namun di sisi lain tetap harus adanya usaha untuk memperbaiki negara dan politik yang kurang baik atau sesuai dengan tujuan awalnya. Agar usaha tersebut tidak menyimpang dari jalannya maka perlu adanya perenungan terkait etika politik.[10]

Hal ini yang juga dirasakan oleh kelompok tasawuf atau sufi yang melembaga sebagai sesuatu yang disebut *thoriqoh* atau tarekat yang saat ini sudah berkembang di seluruh dunia salah satunya yakni Tarekat Shiddiqiyyah. Seperti yang kita ketahui bahwa faham tasawuf adalah faham yang penganutnya selalu menjaga kebersihan jiwanya dari sifat-sifat kotor, tercela dan tidak terpuji. Tarekat Shiddiqiyyah selain menjadi dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia juga

[9] Sinaga, *Etos dan Moralitas*, 14.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru-baru ini menanggapi perkembangan permasalahan politik yang selama ini ada di Indonesia dan di seluruh dunia.

Tarekat Shiddiqiyyah berpandangan bahwa praktek berpolitik yang terjadi dimana-mana saat ini adalah politik yang kotor dan jahat yang sudah menjadi sistem global. Hal ini sudah tidak terjadi hanya pada karakter pribadi saja melainkan sudah menjadi sistem menyeluruh yang harus diikuti dan tidak boleh tidak jika ingin selamat dan menguntungkan.[11]

Menurut Tarekat Shiddiqiyyah kiprah politik seharusnya mengedepankan etika yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yakni Al-Quran dan yang dipraktekkan Rasulullah saw. dimana politik ialah usaha bersama untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan suatu negara dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Etika politik sangatlah penting jika masuk dalam ranah politik. Karena jika berpolitik tidak berbasis etika maka setiap tindakan pasti akan menyimpang. Tidak memperhatikan etika politik dalam berbangsa dan bernegara hanya akan menyebabkan cita-cita menuju adil dan makmur serta berubah menjadi Indonesia yang terpuruk dimana korupsi, kolusi dan nepotisme mengisi di setiap sudut kehidupan berbangsa dan bernegara.[12]

Tarekat satu-satunya ukuran adalah Al-Quran dan Hadits yang sangat mementingkan etika atau akhlak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dimana sangat menekankan nilai-nilai kejujuran, persaudaraan, keadilan, berbaik

---

[11] Organisasi Ikhwan, "Mungkinkah Tasawuf Berpolitik?", *Al-Kautsar* Edisi 126 (Jombang, November, 2016), 22.
[12] Ikhwan, *Mungkinkah Tasawuf*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangka, berkata benar, berpikiran lurus dan lain-lain. Ajaran Tarekat Shiddiqiyyah sangat memperhatikan kebersihan hati. Akan tetapi, meski Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah memiliki pandangan etika politik yang dapat menjadi sebuah acuan masih belum bisa direalisasikan dengan baik. Karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengurus di salah satu lembaga Shiddiqiyyah dan adanya warga Shiddiqiyyah yang menjadi pemimpin daerah kemudian masih belum bisa mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Hal ini diindikasikan masih ada penelantaran warga miskin, fasilitas kesehatan yang masih belum dirasakan oleh masyarakat Jombang di daerah pelosok-pelosok, jalanan umum yang masih rusak di beberapa daerah yang ini juga disadari sendiri oleh Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah sendiri.

Menyadari hal tersebut peneliti menyimpan suatu ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam sebenarnya apakah yang kemudian menjadi landasan etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah agar bangsa Indonesia berada dalam etika berpolitik yang sesuai dengan wujud politik yang berkeimanan dan berkemanusiaan dengan konsep *rohmatan lil 'alamiin*.[13] Mengingat masih adanya pelanggaran nilai-nilai etika politik yang dilakukan oleh salah satu pengurus lembaga Shiddiqiyyah juga warga Shiddiqiyyah.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini adapun rumusan masalah yang digunakan yakni:

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah?
2. Bagaimana Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah serta warganya menerapkan nilai-nilai etika politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penyusunan penelitian ini, maka dibuatlah tujuan ini untuk mengetahui lingkup permasalahan:

1. Untuk mengetahui etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika politik yang dilakukan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah serta warganya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritik, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa, peneliti, politisi, hingga masyarakat secara umum sebagai khazanah keilmuan khususnya terkait dengan etika politik dalam pandangan lembaga tarekat Shiddiqiyyah. Dengan begitu, teori, konsep, dan cara analisis yang ada dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dalam rangka memahami etika politik dalam berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya ternyata etika politik sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik dan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan dari berbagai lembaga sosial, partai politik, dan organisasi keagamaan. Bahkan hal itu berlaku dalam tingkatan organisasi kegamaan sosial di Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang etika politik, sebelumnya pernah dilakukan dan terdapat beberapa hasil penelitian tentang hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya penelitian tentang etika politik pernah dilakukan oleh Arfiadry Wibisono seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 dalam penelitian Arfiadry mengambil judul "Etika Politik dalam Perspektif Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto". Temuan yang didapat dalam penelitan pertama, konsep etika politik pada partai kebangkitan bangsa kabupaten Mojokerto tidak tertulis secara jelas. Menurut perspektif elite partai berpendapat bahwa konsep etika politik pada PKB ada dua yakni mencontoh Rasulullah dalam berpolitik dan konsep etika politik yang ada di mabda *siyasiy* (Prinsip Dasar Perjuangan). Kedua, para elite PKB dalam menjalankan konsep etika politik masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena pada saat memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar elite masih menggunakan *money politics*. Ketiga elite PKB masih belum bisa mengabdikan ke masyarakat seluruhnya karena adanya indikasi dalam memutuskan kebijakan masih mementingkan kepentingan partai.[14]

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ali seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 dengan judul "Etika Politik Jamaah Hizbut Tahrir di Surabaya". Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa etika politik Hizbut Tahrir dilakukan berdasarkan etika politik Islam dan dilaksanakan sesuai dengan metode dakwah Rasulullah saw. yang menjadi bagian dari politik Hizbut Tahrir. Sudut pandang etika atau akhlak politik Hizbut Tahrir masuk dalam etika sebab politik yang dilakukan kelompok ini adalah aktivitas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk mempersatukan umat di Mekkah dan di Madinah.[15]
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam Ahmad seorang mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul "Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer". Dalam penelitian tersebut lebih mengedepankan *human relation* (hubungan kemanusiaan). Dimana dalam menjalankan misi Nabi Muhammad tidak hanya tertuju pada suatu kaum, golongan, atau keturunan berbeda karena adat agamanya. Politik harus didasari oleh

[14] Arfiadry Wibisono, "Etika Politik dalam Perspektif Elit PKB Kabupaten Mojokerto" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 112.
[15] Ibnu Ali, "Etika Politik Jamaah Hizbut Tahrir" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran nuansa politik. Politik tanpa moral merupakan kesalahan yang dapat menghancurkan baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Politik tidak hanya memperebutkan kekuasaan dan mempertahankannya. Melainkan politik adalah dunia dimana komitmen ditetapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum.[16]

4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syari'ati. Hasil temuan dari penelitian tersebut Ali Syari'ati mewujudkan Islam sebagai kerangka dasar bagi kehidupan sosial dan politik Iran. Ia menginginkan agar Islam dijadikan dasar etika politik yang mampu membebaskan rakyat dari berbagai ketidakadilan dan ke*dzaliman*. Misi sejatinya ialah membebaskan golongan tertindas. Meski dalam penelitian ini Ali Syari'ati tidak mendefinisikan secara jelas tentang etika politik namun, dalam konsep politik Syari'ati menunjukkan landasan etika politik dalam mendefinisikan politik. Melihat konsep negara Syari'ati yang memiliki arti birokrasi atau administratif dan tanggung jawab negara untuk mendidik dan memperbaiki pandangan hidup masyarakat.[17]

---

[16] Abdul Salam Ahmad, "Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PGRI Yogyakarta, 2015), 12.

[17] Sugiyono, "Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syari'ati" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terdahulu di atas menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Perbedaan yang paling mendasar yaitu pada objek penelitian dan waktu yang berbeda. Adapun persamaan pada tema penelitian penulis yakni terkait Etika Politik guna dapat memperkaya bahan kajian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan penulis. Kemudian hal yang menarik dari penelitian penulis ialah ketika tarekat yang berfaham tasawuf membicarakan permasalahan politik yang mana menurut Tarekat Shiddiqiyyah saat ini sedang maraknya kemorosotan etika atau moral dalam berpolitik dan perlu adanya usaha membenahi sebuah moral dalam berpolitik guna mengetahui akan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

F. Penegasan Konsep

Judul penelitian yang penulis kaji ialah "Etika Politik dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah Losari-Ploso-Jombang". Untuk penjelasannya maka perlu ada batasan operasional dengan tujuan penelitian ini agar tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya:

1. Etika Politik: menjalankan suatu sistem kekuasaan atau perjuangan untuk memperolehnya, yang sesuai dengan aturan-aturan etika ataupun moral yang ada sehingga dalam menjalankan suatu pemerintahan tidak merugikan orang lain dan dapat membawa kemaslahatan bagi bangsa dan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tarekat Shiddiqiyyah: salah satu tarekat yang dikembangkan dan dihidupkan kembali oleh seorang Mursyid asal Jombang yakni Muchammad Muchtar Mu'thi pada tahun 1958. Sebelumnya nama tarekat ini adalah Tarekat Kholwatiyyah yang mengalami perubahan nama menjadi Tarekat Shiddiqiyyah atas permintaan guru dari Kyai Muchtar yakni Syekh Syu'eb Jamali.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang valid dan rumusan yang sistematis serta sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut;

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh objek penelitian secara menyeluruh dengan cara menggambarkan apa adanya dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[18]

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang terkait dengan bagaimana etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah di Losari-Ploso-Jombang. Dilihat dari jenis penelitiannya hal ini merupakan penelitian lapangan.

[18] Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini mencoba berfokus pada bagaimana cara Tarekat Shiddiqiyyah menerapkan nilai-nilai etika politik di Jombang, mengingat Shiddiqiyyah menganggap bahwa realitas saat ini bangsa lupa akan jati dirinya sehingga ketika melakuan persoalan-persoalan internal maupun eksternal dalam pemerintahan terkadang lalai akan fungsi, kewajiban dan hak-haknya serta memelihara kemerdekaan bangsa untuk mengantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukan-kedudukan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Jalan Raya Ploso Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang bertepatan pada pusat Tarekat Shiddiqiyyah. Pengambilan lokasi penelitian ini memiliki beberapa alasan yaitu:

Pertama, Tarekat Shiddiqiyyah adalah salah satu faham tasawuf yang paling dominan di Jombang melihat banyaknya orang-orang yang menempuh pendidikan di pondok pesantren Tarekat Shiddiqiyyah dan banyaknya warga Jombang menganut faham tasawuf ini.

Kedua, sebagai akademis, penulis merasa tertarik untuk mengetahui Tarekat Shiddiqiyyah yang merupakan faham tasawuf sangat mengutamakan kebersihan hati kemudian berbicara persoalan politik terutama etika politik, yang biasa dikenal dengan penuh intrik dan perebutan kekuasaan serta adanya dan untuk mengetahui bagaimana cara Lembaga serta warga Tarekat Shiddiqiyyah dalam menerapkan nilai-nilai etika politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, akses yang mudah untuk penulis meneliti karena salah satu anggota keluarga yang juga termasuk murid Tarekat Shiddiqiyyah. Diharapkan pada penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsih terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju negara yang berkeimanan dan berkemanusiaan serta maju dalam aspek pendidikan politik.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data merupakan salah satu komponen utama dalam proses pelaksanaan penelitian karena pembacaan dan analisis penulis didapatkan dari data yang diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya ialah seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan menggunaan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan seperti mengadakan observasi ke lapangan dan wawancara secara langsung dengan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan penelitian.[19] Terutama terkait dengan bagaimana etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah dan penerapan nilai-nilai etika politik yang dilakukan Lembaga dan warga Tarekat Shiddiqiyyah yang dikumpulkan dari beberapa informan. Dalam penelitian ini informan yang diambil yakni Umul Khoiron (Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Shiddiqiyyah), Ahmad Fathoni

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah), dan Kus Hartono (Ketua Redaksi Majalah Al-Kautsar).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya.[20] Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, *browsing* data internet, Majalah Al-Kautsar yang membahas terkait etika politik dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi baik yang didapat dari lapangan maupun dari tempat atau sumber lain.

4. Informan Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal dan tepat sasaran, karena itu informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan penguasaan atau pengetahuan terkait dengan data yang ingin digali, kemudian aktivitasnya yang masih berkaitan dengan objek penelitiannya, serta yang dianggap mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. Untuk itulah peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan pada penelitian ini.[21]

Pada penelitian ini berikut informan yang ditentukan berdasarkan peranannya, sering berkomunikasi dan dianggap mengetahui betul terhadap

[20] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 99.
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dab R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Mursyid Tarekat Shiddiqiyyah terkait etika politik dalam mencapai tujuan sebuah negara yang *thoyyibah*:

a. Ahmad Fathoni selaku Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah untuk mengetahui etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah serta penerapan yang dilakukan terkait wujud pelaksanaan nilai-nilai etika politik.
b. Umul Khoiron selaku Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Shiddiqiyyah untuk mengetahui sejarah Tarekat Shiddiqiyyah, penjelasan mengenai organisasi, kepengurusan di Shiddiqiyyah dan yang mengkoordinasi setiap kegiatan organisasi lain termasuk pengembangan program politik jati diri bangsa sebagai wujud pembenahan etika politik saat ini.
c. Kus Hartono selaku Ketua Redaksi Al-Kautsar yang mana Al-Kautsar ini adalah salah satu mediasi atau wadah informasi yang dapat menjangkau seluruh warga yang tertinggal berita ter*update* seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan Shiddiqiyyah termasuk menggali informasi terkait pemikiran etika politik dan penerapannya.
d. Serta warga Shiddiqiyyah yang mengampuh pendidikan di Pesantren Majma'al Bahrain dan aktif dalam kegiatan Tarekat Shiddiqiyyah. Peneliti mengambil sampel 6 orang yang masing-masing mewakili anggota lembaga otonom Shiddiqiyyah seperti ORSHID, OPSHID, THGB, DHIBRA, YPS, dan Kautsaran Putri. Sehingga di sini diamati dan diambil keterangan seputar efektivitas penerapan etika politik yang dilakukan Tarekat Shiddiqiyyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada peneltian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan *dokumentasi.*

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam pencarian data pada penelitian kualitatif. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi maupun suasana ada pada fokus penelitian. Selama observasi berlangsung, penulis mampu memberikan gambaran awal tentang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis masalah yang ada. Dalam penelitian ini observasi berlangsung di di Jalan Raya Ploso Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang-Jawa Timur yang bertepatan pada salah satu pusat lembaga Tarekat Shiddiqiyyah. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi eksperimen atau sering juga dikenal dengan observasi alamiah. Dalam observasi alamiah peneliti mengamati kejadian-kejadian dan perilaku objeknya secara natural dalam arti tidak ada usaha untuk mengontrol atau yang lainnya. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah *check list* yaitu suatu daftar yang sudah berisi tentang nama-nama informan dan materi yang akan ditanyakan kepada mereka.[22]

[22] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian. Dalam proses wawancara, subyek penelitian atau informan harus jelas, dengan mengetahui bagaimana latar belakang informan tersebut.[23] Pencarian informasi dengan cara wawancara terlebih dahulu ditentukan *key-informan* (informan kunci). *Key-informan* merupakan sumber data yang paling urgen dalam upaya pencarian data yang valid. Dalam penelitian ini yang menjadi objek *interview* adalah orang-orang yang dianggap mengerti dan memahami etika politik yang mewakili pandangan tarekat. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* atau sampel bertujuan yang memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.[24] Dalam hal ini penulis menganggap bahwa informan tersebut mengetahui masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan penulis.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang

[23] Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

topik yang diteliti.[25] Wawancara model ini lebih memberikan kebebasan bagi seorang peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dasar pertimbangan menggunakan metode *in depth interview* dalam pengumpulan data adalah untuk memperoleh konstruksi atau kejelasan tentang etika politik yang seharusnya ditanamkan pada diri bangsa Indonesia. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disusun sebelumnya. Dengan instrumen dimaksud, diharapkan peneliti akan lebih fokus pada permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. Arsip-arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi dan *interview*.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihat sebagaimana adanya. Penulis disini menggunakan teknik analisis deskriptif dimana data yang peneliti peroleh kemudian akan diuraikan dan disusun serta dianalisis. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data dan analisis

[25] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktuaisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dilakukan secara bersamaan dengan cara saat pengumpulan data dilakukan, saat itu pula dilakukan analisis data melalui tiga tahap yaitu:[26]

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data *display* berarti men*display* data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. *Conclusion Drawing* / *Verification*

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan.[27]

---

[26] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta:UII Press, 2007), 41.

[27] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penegasan konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II yaitu Kajian Pustaka, yang meliputi pengertian etika, pengertian politik, dan pengertian etika politik.

Pada BAB III yaitu Gambaran Umum Tarekat Shiddiqiyyah, berisikan tentang sejarah Tarekat Shiddiqiyyah, identitas Tarekat Shiddiqiyyah serta organisasi dan kepengurusan.

Pada BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang menjelaskan terkait etika politik dalam pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyyah dan cara Lembaga serta warga Tarekat Shiddiqiyyah dalam menerapkan nilai-nilai etika politik.

Pada BAB V yaitu Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id